

LAPORAN KINERJA INTERIM TW I

PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



2025

KATA PENGANTAR



Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan laporan kinerja unit kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan kinerja ini

mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan selama Triwulan I Tahun 2025 atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara umum sasaran kinerja yang dicapai telah sesuai dengan rencana.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja Pusat Data Informasi Obat dan Makanan selama Triwulan I tahun 2025, serta dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, sekaligus

menjadi sarana evaluasi, sehingga dapat menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja demi mewujudkan *good governance* secara berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta, 30 April 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan,



Abdurrochman Indrajaya Sukma.,S.Kom.,M.Kom

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian dari pemerintahan, Badan POM mempunyai tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam membantu mewujudkan visi Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukan dukungan dalam hal teknologi informasi untuk mempermudah pengawasan obat dan makanan. Maka pada tahun 2025 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyusun 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, *Realtime*, dan Terintegrasi dan (2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

Sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut:

1. Nilai Indeks SPBE
2. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi
3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
4. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
5. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
6. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
7. Indeks Manajemen Risiko Pusat data dan Informasi

Dalam melaksanakan program/kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp.44.521.934.000,--. Sampai dengan 31 Maret 2025, Pusdatin telah mengalami 2 (satu) kali pemblokiran mandiri sebesar Rp.17.052.812.000,-- yang dilakukan pada 02 Desember 2024 dan 22 Februari 2025.

Realisasi menurut aplikasi OM SPAN per tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp.5.418.120.914,-- atau 12,17%, sedangkan realisasi tanpa belanja pegawai sebesar Rp.4.112.899.600,-- atau 10,41% serta realisasi anggaran dengan outstanding kontrak sebesar Rp.16.185.750.497,-- atau 36,35%.

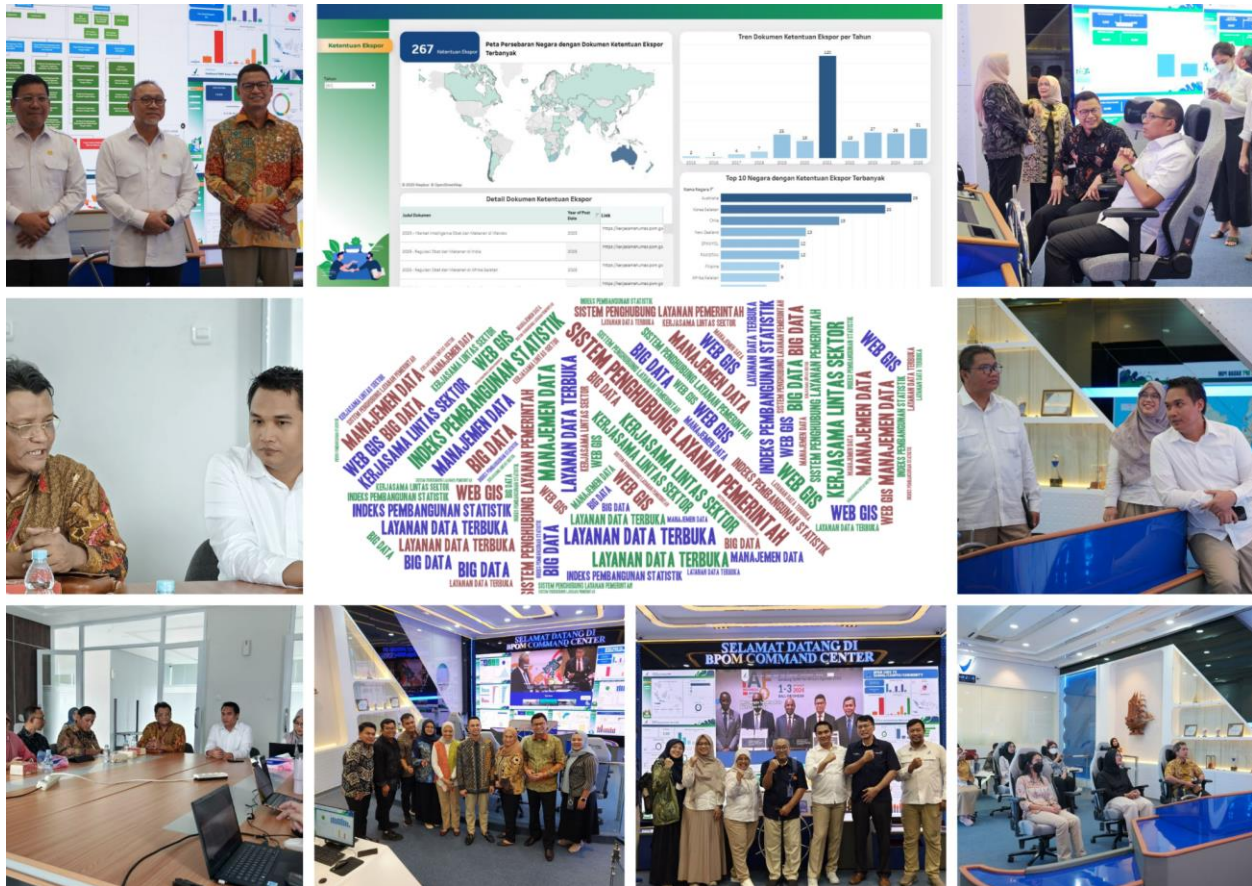
Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI.....	6
HIGHLIGHT KINERJA.....	7
BAB I_PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Gambaran Umum Organisasi	10
1.3 Struktur Organisasi	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Uraian Singkat Renstra	14
A. Visi.....	14
B. Misi	14
C. Tujuan.....	15
D. Sasaran strategis.....	15
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	16
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	16
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	17
2.5 Metode Pengukuran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	64
3.3 Realisasi Anggaran	78
BAB IV_PENUTUP.....	80

HIGHLIGHT KINERJA

ARSITEKTUR DATA DAN KERJA SAMA LINTAS SEKTOR



Pada triwulan pertama ini, Pusdatin Obat dan Makanan menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam mendukung penerapan SPBE terkait data melalui **implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM** yang telah berhasil menghubungkan data-data seperti data registrasi obat, data KFA, PBF, industri farmasi dan lain-lain untuk memfasilitasi pertukaran data yang lebih efisien dan aman antar instansi. Selain itu, upaya **manajemen data** terus diperkuat melalui Koordinasi dengan berbagai lintas sektor dengan mempertimbangan berbagai solusi teknologi menjadi

salah satu upaya dalam efisiensi manajemen data di lingkungan BPOM, yang meningkatkan kualitas dan keandalan informasi. Sebagai wujud transparansi dan dukungan terhadap ekosistem digital, **layanan data terbuka BPOM** juga mengalami peningkatan dengan pembuatan serta updating dashboard yang dikategorisasikan menjadi 3 jenis informasi yaitu informasi pendukung layanan publik, informasi dukungan kebijakan dan informasi pengawasan obat dan makanan, yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk inovasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Data yang telah diolah sesuai proses manajemen data dimanfaatkan **BPOM Command Center (BCC)** untuk menyajikan visualisasi data yang bersumber pada data pengawasan obat dan makanan yang kemudian dapat menjadi acuan pimpinan dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, kegiatan arsitektur data dalam mendukung implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial maka dilakukan persiapan penilaian **Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**. Dalam pelaksanaan Pusdatin melibatkan Tim Penilai Internal EPSS BPOM yang diwakilkan oleh unit kerja yang mendukung penilaian untuk setiap indikator. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tim Penilai Internal EPSS BPOM merupakan salah satu bentuk komitmen unit kerja dalam mendukung BPOM meraih Indeks Pembangunan Statistik yang optimal. Selain itu adanya koordinasi yang baik bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selaku pembina statistik BPOM tahun 2025.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE, dengan melakukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang meliputi media, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan oleh BPOM. BPOM juga memiliki aplikasi layanan publik yang disebut sebagai "Portal Layanan Publik BPOM" yang bersifat citizen-centric atau berfokus pada pengguna. Aplikasi ini mencakup berbagai layanan seperti pencarian produk, pengaduan, pengecekan nomor registrasi, serta laporan terkait pengawasan obat dan makanan. Portal ini adalah wujud nyata dari Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, memungkinkan berbagai stakeholder untuk berkontribusi dalam pengawasan secara digital. Melalui aplikasi ini, BPOM berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan keamanan produk yang beredar di Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, peran dan kegiatan prioritas Satu Data Indonesia (SDI) diarahkan untuk memperkuat tata kelola data nasional guna mendukung pembangunan berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Beberapa kegiatan prioritas tersebut meliputi penguatan regulasi SDI sebagai landasan hukum dan kelembagaan, pembangunan Open Data Indonesia yang juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam proses akses ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta menjadikan SDI sebagai elemen penting dalam Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Selain itu, SDI juga berperan dalam sinkronisasi indikator antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan lebih terkoordinasi, serta bertindak sebagai integrator data untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan informasi lintas sektor.

Sejalan dengan arah tersebut, Ekosistem Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi menggambarkan arsitektur sistem yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengawasan obat dan makanan secara digital, dengan memanfaatkan teknologi terkini, termasuk analitik, machine learning, dan data science. Sistem ini menggunakan Big Data BPOM yang dihubungkan dengan berbagai aplikasi dan alat analisis, termasuk aplikasi dari instansi lain (KL/LD) serta dashboard untuk memantau dan menganalisis data. Layanan ini diakses oleh berbagai pihak, seperti pelaku usaha, pegawai BPOM, pimpinan, dan masyarakat melalui portal publik, aplikasi mobile, dan website BPOM. Proses pengawasan mencakup registrasi produk (pre-market), pengawasan (post-market), serta pengelolaan data pengujian obat dan makanan. Sistem ini terintegrasi dengan infrastruktur teknologi informasi, meliputi jaringan, server, storage, dan pusat data nasional untuk mendukung pengawasan yang efisien dan efektif.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan I Tahun 2025, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan internal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan internal dan informasi publik;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem informasi layanan eksternal meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan eksternal dan integrasi dan interkoneksi sistem informasi;
4. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola data dan informasi meliputi arsitektur dan layanan berbagi pakai data dan informasi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi tata kelola standar kebijakan, penjaminan mutu, monitoring, dan evaluasi standar teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penanganan insiden dan pemenuhan maturitas insiden keamanan siber.

Dilihat dari tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara garis besar, terdapat 5 (lima) inti kegiatan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan di tahun

2025, yakni:

1. Pengembangan Portal Single Sign On (SSO)
2. Pemenuhan layanan publik BPOM terintegrasi dengan sistem nasional

3. Pilot project integrasi aplikasi pengawasan obat dan makanan
4. Implementasi peta rencana SPBE
5. Penyiapan SDM untuk menggunakan tools microservices

1.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusdatin, Kepala Pusdatin dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural sebagai Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 5 (Lima) ketua tim selaku pelaksana, 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 4 (Empat) Pranata Komputer Mady, dengan rincian sebagai berikut:



Struktur Organisasi PUSDATIN

1.4 Isu Strategis

1. Pengembangan Portal Single Sign On (SSO)
2. Pemenuhan layanan publik BPOM terintegrasi dengan sistem nasional

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

A. Visi

VISI BPOM:

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Visi Badan POM merupakan komitmen Pusdatin dalam perannya sebagai unit pendukung Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan.

B. Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi BPOM 2025-2029, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menjabarkan misinya dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan kebutuhan para pemangku, sebagai berikut:

1. Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan;
2. Menstandarisasi teknologi informasi dan komunikasi di BPOM;
3. Meningkatkan keamanan data dan informasi obat dan makanan; dan
4. Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan
5. Makanan yang profesional.

C. Tujuan

Sesuai dengan tugas Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tujuan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan adalah:

1. Terwujudnya pemenuhan standar data, sistem informasi, infrastruktur dan keamanan TIK BPOM;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan BPOM;

D. Sasaran strategis

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditentukan, maka Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan merumuskan 2 (Dua) sasaran strategis yang terdiri dari 1 (Satu) sasaran strategis pada level Stakeholder Perspective dan (Satu) sasaran strategis pada level Learn and Growth Perspective sebagai berikut:

No	Level	Sasaran
1	Stakeholder Perspective	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi
2	Learn and Growth Perspective	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Pusat Data dan Informasi kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 disusun sebelum DIPA awal TA 2025 pada tanggal 20 September 2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja Pusat Data dan Informasi ditunjukkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi.

dengan Indikator sasaran:

- 1) Nilai Indeks SPBE sebesar 4.59
- 2) Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal sebesar 20%
- 3) Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2.8

2. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

dengan indikator sasaran:

- 1) Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi sebesar 86.52
- 2) Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi sebesar 81.88
- 3) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi sebesar 97.47
- 4) Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi sebesar 2.94

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja tanggal 12 Februari 2025. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan unit untuk memantau

kinerja secara berkala dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4.59 Nilai
		Persentase data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal	20%
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.8 Nilai
2.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97.47 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Nilai

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan	Nilai Indeks SPBE	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.53	-	-	4.59	25.785.944.000
		Persentase data dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal														
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.266.266.000
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.52	106.533.000
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.88	1.194.499.000
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.47	10.082.714.000
		Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	151.578.000
Total															44.521.934.000	

2.5 Metode Pengukuran

1. Indeks Nilai SPBE

Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE merupakan nilai

kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Sesuai Peraturan Menteri PANRB nomor 59 tahun 2020, Indeks SPBE dinilai dari 4 domain yaitu:

1. Kebijakan Internal yang didalamnya terdapat Kebijakan Tata Kelola SPBE;
2. Tata Kelola SPBE yang didalamnya terdapat 3 aspek yaitu Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Manajemen SPBE yang di dalamnya mencakup penerapan manajemen dan audit TIK
4. Layanan SPBE yang didalamnya terdapat 2 aspek yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Nilai diperoleh berdasarkan hasil SPBE oleh Kementerian PAN dan RB mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE atau dari Hasil Penilaian Mandiri Tim SPBE BPOM dengan melibatkan Kementerian PAN dan RB atau Lembaga yang berkompeten di tahun yang tidak dilakukan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

1. Nilai 4,2-5,0 = Predikat "Memuaskan"
2. Nilai 3,5 - < 4,2 = Predikat "Sangat Baik"
3. Nilai 2,6 - < 3,5 = Predikat "Baik"
4. Nilai 1,8 - < 2,6 = Predikat "Cukup"
5. Nilai < 1,8 = Predikat "Kurang"

2. Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi

Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi merupakan bagian dari target

arsitektur SPBE Badan POM Pengembangan one apps mengacu pada 16 peta proses bisnis BPOM dan dikembangkan secara orkestrasi. Pada tahap awal Supper apps dikembangkan secara orkestrasi yang akan dilanjutkan secara refraktori, ditahun 2025 akan ada 3 Modul (proses bisnis) yang akan dikembangkan dengan target pada tahun 2025 telah terbentuk portal SSO dengan BCC dan E-mail.

3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022, terdapat tiga tahapan penilaian EPSS, yaitu penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI), penilaian dokumen, serta penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi oleh Tim Penilai Badan (TPB).Nilai diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral atau dari Hasil Penilaian Mandiri Tim Penilai Internal BPOM.

Komponen Penyusunan Instrumen Evaluasi terdiri dari 5 Domain, 19 Aspek, 38 Indikator.

Nilai Indeks Pembangunan Statistik akan diberi predikat yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan statistik sektoral yang dikelompokkan berdasarkan lima kategori sebagai berikut:

Nilai 4,2 - 5,0 = Predikat "Memuaskan"

Nilai 3,5 - < 4,2 = Predikat "Sangat Baik"

Nilai 2,6 - < 3,5 = Predikat "Baik"

Nilai 1,8 - < 2,6 = Predikat "Cukup"

Nilai < 1,8 = Predikat "Kurang"

4. Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

No	Komponen Pengungkit	Bobot
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penata Tatalaksana	7%
3.	Penataa Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Layanan Publik	10%

No	Komponen Hasil	Bobot
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5%
2.	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

5. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24
2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pealporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

6. Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan

mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori

Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d 60	Kurang	2
60,01 s.d 80	Cukup	3
80,01 s.d 90	Baik	4

90,01 s.d 100	Sangat Baik	5
---------------	-------------	---

7. Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = (Skor Total)/16

Keterangan:

- a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

- b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis di Pusdatin untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2025, membandingkan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2025, diperoleh nilai NKO sementara sebesar 100.00 % dengan kriteria **BAIK**, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target pada setiap indikator pada TW I telah dicapai. Hasil tersebut merupakan evaluasi dari 1 (satu) sasaran strategis (Indikator Nilai Indeks SPBE) dari 2 (Dua) sasaran strategis yang harus dievaluasi, Enam indikator lainnya belum dapat dievaluasi menunggu penilaian indikator kinerja di akhir tahun 2025. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis dan masing-masing indikator sebagai berikut:

NKO Data Tahun 2025 100.00%	Pagu Data Tahun 2025 Rp 2,201,521,258,000	Realisasi Anggaran Data Tahun 2025 Rp 2,096,172,501,043	Capaian Data Tahun 2025 95.21%
--	--	--	---

Kerangka Kerja Logis

Pilih Bulan

Maret

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Nilai Indeks SPBE	4.53	4.53	100.00%
2	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	0.00	0.00	0%
3	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	0.00	0.00	0%
4	Terwujudnya Tatalaksana Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	0.00	0.00	0%
5	Terwujudnya Tatalaksana Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	0.00	0.00	0%
6	Terwujudnya Tatalaksana Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	0.00	0.00	0%
7	Terwujudnya Tatalaksana Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	0.00	0.00	0%

Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2025 Pudatin memiliki 2 (Dua) sasaran strategis dan 7 (Tujuh) indikator kinerja, masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja akan diukur capaian kinerjanya. Berikut data capaian di setiap indikator kinerja dan sasaran strategis pada triwulan I (Januari-Maret):

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi Tahunan	Realisasi TW I	Capaian TW I (%)	Capaian Tahunan (%)	Kriteria terhadap Capaian Tahunan
Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Nilai Indeks SPBE	4,59	4,53	4,53	4,53	100%	98,7%	Baik

Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	Persentase data dan sistem informasi pengawasan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20%	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
	Indeks Pembangunan statistik (IPS)	2,8	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86,52	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81,88	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97,47	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan
	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2,94	-	Akhir Tahun	-	-	-	Belum Ditentukan

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya tercapai dengan kriteria BAIK, 6 (Enam) Indikator kinerja yang realisasi kerjanya tercapai dengan kriteria BELUM

DAPAT DITENTUKAN. Kriteria Baik menunjukkan bahwa target triwulan I tahun 2025 sudah dapat tercapai. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pusdatin, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Data dan System Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi

INDEKS SPBE

- 1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan I 2025**
Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada akhir triwulan 1, realisasi Nilai Indeks SPBE telah dicapai sebesar 4,53. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan 1 sebesar 4,53 maka telah tercapai capaian kinerja 100%, dan mencapai kriteria “BAIK”.
- 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2025 dengan Realisasi Triwulan sebelumnya**
Dengan realisasi Nilai Indeks SPBE telah dicapai pada triwulan 1 tahun 2025 sebesar 4,53, maka jika dibandingkan dengan realisasi triwulan IV tahun 2024, maka telah tercapai kinerja 100%, dan mencapai kriteria “BAIK”.
- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan target tahunannya**
Telah ditetapkan target sebesar 4,59 pada akhir tahun 2025, dan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan 1 tahun 2025 sebesar 4,53, maka telah tercapai kinerja sebesar 98,69 % dengan kriteria “BAIK”.
- 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).**

PERENCANAAN DAN PENJAMIN MUTU TIK

a. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Badan POM

Implementasi SPBE di BPOM merupakan perwujudan dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun baik melalui audit secara langsung oleh Kementerian PAN RB maupun *self assessment* oleh Badan POM sendiri. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE mencakup 47 indikator yang harus dipenuhi oleh Badan POM. Pada 2024 Indeks SPBE BPOM mendapatkan nilai 4,53 dengan kriteria memuaskan. Nilai ini meningkat 0,45 dari Indeks SPBE sebelumnya tahun 2023 yaitu 4,08.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

- 1) SK Tim Asesor SPBE Tahun 2025 telah disahkan oleh Sekretaris Utama BPOM pada 17 Maret 2025. Tim Asesor SPBE memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri dan evaluasi terhadap hasil *self assessment* pada setiap indikator sesuai ketentuan.
- 2) SK Tim Koordinasi SPBE telah selesai disusun dan dalam proses pengesahan oleh Kepala Badan POM yang dilakukan dalam pemantauan Biro Hukum dan Organisasi. Tim Koordinasi SPBE

memiliki tugas koordinasi, kerja sama, dan integrasi dengan pihak eksternal dalam dan/atau luar negeri.

- 3) SK Teknis Reviu Arsitektur SPBE Tahun 2025 telah disahkan oleh Sekretaris Utama BPOM pada 17 Maret 2025. Tim Teknis Reviu Arsitektur SPBE mempunyai tugas melaksanakan untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, memberikan masukan dan mengawal pelaksanaan pekerjaan reviu arsitektur SPBE.

b. Tindak Lanjut Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE telah selesai disusun pada akhir 2024. Rancangan Kepka ini telah disampaikan kepada seluruh unit kerja dan mencapai kesepakatan persetujuan rancangan Kepka. Dalam proses pengesahan dilaksanakan penandatanganan verbal kepada seluruh Pimpinan Tinggi Pratama.

Untuk menindaklanjuti rancangan kepka tersebut yang telah disetujui oleh seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, telah disampaikan.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

- 1) Monitoring terhadap persetujuan Verbal dari seluruh Pimpinan Kerja Pratama.
- 2) Reviu terhadap masukan atau usulan baru atau perbaikan dari unit kerja.
- 3) Nota Dinas kepada Biro Hukum dan Organisasi perihal Penyampaian Usulan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Arsitektur dan Peta Rencana Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Melalui Nota Dinas tersebut diharapkan Biro Hukum dan Organisasi dapat melakukan reviu

terhadap Rancangan Kepka serta melakukan proses pengesahan oleh Kepala BPOM. Kepka ini dibutuhkan sebagai dasar implementasi Peta Rencana SPBE BPOM

c. **Reviu Kebijakan/Pedoman/Standar SPBE di Lingkungan BPOM**

Reviu Kebijakan/Pedoman/Standar terkait dengan SPBE di Lingkungan BPOM merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kebijakan/pedoman/standar yang terkait dalam implementasi SPBE tetap selaras dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan bisnis proses organisasi. Pelaksanaan reviu dokumen ini dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Dokumen tersebut yang akan menjadi acuan dalam implementasi SPBE di Lingkungan BPOM.

Reviu ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian prosedur operasional dengan ketentuan regulasi terbaru, serta mendukung optimalisasi layanan digital yang andal, aman, dan terintegrasi di sektor obat dan makanan.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

1) **Reviu SOP Makro dan Mikro terkait Layanan SPBE**

Pada Triwulan I tahun 2025, dilaksanakan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro dan Mikro yang terkait dengan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Daftar SOP Makro dan Mikro yang direviu yaitu::

- a. SOP Makro Manajemen Layanan Berbasis Elektronik yang terdiri dari:
 - I. SOP Pemenuhan Permintaan Layanan Berbasis Elektronik, dan
 - II. SOP Penanganan Laporan Insiden Berbasis Elektronik (*Incident Handling*)

b. SOP Mikro Pengelolaan Masalah Layanan Berbasis Elektronik
(*Problem Management*)

2) Pedoman Standar Layanan TIK

Pada Triwulan I tahun 2025 sudah dilakukan penyusunan Standar Layanan TIK Pusdatin. Pedoman Standar Layanan ini telah disahkan pada 26 Maret 2025. Dengan adanya pedoman ini diharapkan layanan TIK Pusdatin melalui Help Pusdatin dapat menghasilkan kualitas layanan yang optimal sesuai standar bagi pelaksana dan pengguna layanan TIK BPOM

d. Penyelenggaraan Pendaftaran Sistem Elektronik

Dalam rangka melaksanakan amanat SPBE salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran baru adalah pelaksanaan Clearance EGA SPBE yang dilaksanakan oleh setiap instansi sebelum melakukan pekerjaan atau pengadaan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada proses clearance EGA SPBE tahun 2025 ditetapkan persyaratan tambahan bahwa seluruh sistem elektronik yang diajukan wajib didaftarkan pada layanan Pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Proses pendaftaran ini wajib dilakukan oleh setiap pengelola sistem elektronik, oleh karena itu perlu dilakukan pendaftaran pejabat dan sub pejabat untuk mendapatkan akses pada <https://pse.layanan.go.id/login>.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

- 1) Surat Tugas Sub Pejabat PSE Nomor: TI.04.06.8.02.25.08 tanggal 4 Februari 2025 untuk 20 sub pejabat.
- 2) Surat Tugas Sub Pejabat PSE Nomor: TI.04.06.8.02.25.14 tanggal 19 Februari 2025 untuk 6 sub pejabat.

e. Pemenuhan Standarisasi Sistem Informasi

Standar Sistem Informasi (SSI) merupakan pedoman utama bagi seluruh unit kerja dan pengembang sistem di lingkungan BPOM. Standar ini mengatur seluruh proses pembangunan sistem, dari pengajuan awal hingga pemeliharaan pasca-implementasi. Dasar Hukum Pedoman berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 445 tahun 2023 dan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

Pada Triwulan I tahun 2025, terdapat 12 usulan pengembangan aplikasi yang sudah diterima oleh Pusdatin, aplikasi tersebut yaitu:

No	Nama Aplikasi	No	Nama Aplikasi
1.	Aplikasi e-Was	7.	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT)
2.	Efek Samping Kosmetik	8.	Ekspor Impor
3.	SMART POM	9.	Sistem Manajemen Mutu (QMS)
4.	Evaluasi KIE	10.	Subsite PPSDM
5.	Subsite Ditwas OT	11.	Subsite BPOM
6.	E-Sertifikasi	12.	PINTeR SMKPO

- f. Pemenuhan Rekomendasi Permohonan Alat Pengolah Data (APD)
 Proses ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan perangkat kerja yang mendukung operasional serta pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penerbitan rekomendasi dilaksanakan mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Standar Infrastruktur

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan reviu serta penerbitan rekomendasi terhadap sejumlah permohonan terkait Alat Pengolah Data (APD) yang diajukan oleh unit-unit kerja di lingkungan Badan POM.

Adapun reviu pengajuan rekomendasi pengadaan APD yang telah dilaksanakan meliputi:

- 1) Usulan Penambahan Persetujuan Alat Pengolah Data (APD) untuk mendukung kebutuhan Alat Laboratorium Tahun 2025 dari Balai POM di Palu.
 - 2) Usulan Pengajuan Alat Pengolah Data Tahun 2025 dari Loka POM di Kabupaten Toba.
 - 3) Usulan Pengajuan Alat Pengolah Data (APD) Tahun 2025 dari Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
 - 4) Usulan Pengadaan Alat Pengolah Data Tahun Anggaran 2025 dari Loka POM di Kabupaten Sambas.
 - 5) Usulan Pengadaan Alat Pengolah Data Tahun 2025 dari Balai POM di Jember.
 - 6) Permohonan Persetujuan Penggunaan Produk Impor oleh Inspektur Utama.
- g. Pemenuhan ISO Series

Pusdatin berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai standar internasional dan nasional. Untuk standar internasional, Pusdatin mengacu kepada standar ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dalam pemenuhan ini dilakukan beberapa tahapan

diantaranya awareness, reviu dokumen, RTM, audit internal dan audit eksternal.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

- 1) Awareness ISO 27001: 2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- 2) Awareness ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ARSITEKTUR DATA DAN KERJA SAMA LINTAS SEKTOR

a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Kegiatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) di BPOM didasarkan pada Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan menjadi salah satu aspek dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE pada Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan yang mendukung SPLP di BPOM pada triwulan 1 adalah monitoring dan evaluasi terhadap progress kegiatan yang telah dilaksanakan seperti adanya dokumentasi pertukaran data di internal dan eksternal BPOM serta koordinasi lintas sektor yang hasilnya diharapkan dapat berkesinambungan dan selaras dengan tujuan Satu Data Indonesia.

b. Manajemen data

Manajemen data merupakan kegiatan yang mendukung pengelolaan data di lingkungan BPOM sesuai amanah dari SPBE dan Satu Data Indonesia yang kemudian dibuat kebijakan pedoman manajemen data di lingkungan BPOM (Kepka BPOM No. 16 Tahun 2024). Kegiatan manajemen data di triwulan 1 berfokus pada monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi acuan dalam perbaikan pada tahapan

manajemen data di lingkungan BPOM sehingga hasilnya juga selaras dengan *Enterprise Architecture* (EA) SPBE di lingkungan BPOM.

c. Layanan Data terbuka

Layanan data terbuka merupakan kegiatan penyajian serta pemanfaatan data dan informasi. Salah satunya adalah BPOM Command Center (BCC). BCC menyajikan visualisasi data dan informasi untuk kebutuhan pimpinan dalam mendukung pembuatan kebijakan dengan memberikan kemudahan melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh proses bisnis di Badan POM secara komprehensif dan real time dalam bentuk dashboard. Data dan informasi yang disajikan berasal dari unit kerja di BPOM yang kemudian diolah dan divisualisasi sesuai kebutuhan organisasi. Pada triwulan 1 ini telah dilaksanakan monitoring evaluasi dashboard di BCC serta kunjungan dan koordinasi dengan lintas sektor. Hal tersebut menjadi faktor pendukung kinerja layanan data terbuka dan kedepannya dapat menjadi poin pengembangan pengelolaan data terbuka di lingkungan BPOM.

Keberhasilan Implementasi Layanan data, manajemen data serta layanan data terbuka dalam SPBE ini tidak lepas dari beberapa faktor kunci, antara lain adanya koordinasi teknis yang aktif dan berkelanjutan antara stakeholder terkait seperti Kementerian KOMDIGI, BPS, Bappenas, serta unit pusat terkait. Dukungan penuh dari pimpinan, kesiapan teknis internal yang memadai termasuk ketersediaan SDM TIK yang kompeten, infrastruktur yang memadai serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip SPBE dalam terkait data. Pendampingan teknis yang diberikan oleh BPS dan KOMDIGI sangat berperan penting untuk peningkatan dan optimalisasi pemenuhan SPBE terkait data.

INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PUSAT DATA

a. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN)

Sebagai bentuk nyata dalam mendukung mandat Presiden Republik Indonesia terkait percepatan transformasi digital nasional serta implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menjadi salah satu instansi pemerintah pionir dalam pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional (PDN) yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI). Badan POM telah melakukan migrasi 100% terhadap seluruh sistem informasi dan aplikasi yang sebelumnya dikelola secara mandiri ke dalam infrastruktur PDN KOMDIGI dan menjadi salah satu Kementerian/Lembaga pertama yang sepenuhnya beralih menggunakan layanan PDN sebagai pusat pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keberhasilan ini tidak lepas dari beberapa faktor kunci, antara lain adanya koordinasi teknis yang aktif dan berkelanjutan antara BPOM dan Kementerian KOMDIGI, dukungan penuh dari pimpinan, kesiapan teknis internal yang memadai termasuk ketersediaan SDM TIK yang kompeten, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip SPBE dalam pengembangan layanan digital. Pendampingan teknis yang diberikan oleh KOMDIGI juga turut mempercepat proses pemetaan, pemindahan, serta pengoperasian sistem pasca-migrasi.

b. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)

Sebagai bagian dari infrastruktur dasar dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) memiliki peran strategis dalam menjamin keterhubungan layanan digital antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara aman, efisien, dan terintegrasi. Keberhasilan pemanfaatan JIP di berbagai instansi pemerintah didorong oleh sejumlah faktor kunci, antara lain adanya komitmen dari pimpinan instansi dalam

menjadikan JIP sebagai tulang punggung (*backbone*) utama konektivitas antar sistem informasi internal maupun eksternal, serta kesiapan infrastruktur pendukung seperti perangkat jaringan, titik akses, dan sistem pengamanan jaringan (*network security*) yang memadai.

Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang turut mempengaruhi tingkat pemanfaatan dan kinerja JIP di beberapa instansi. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya kapasitas bandwidth yang tersedia, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi fleksibilitas dalam peningkatan kapasitas jaringan. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya sinkronisasi data secara real-time, lambatnya akses terhadap layanan digital, serta menurunnya kualitas integrasi sistem lintas instansi. Oleh karena itu, dukungan kebijakan yang lebih adaptif dan alokasi sumber daya yang proporsional dari pemerintah pusat masih diperlukan agar upaya penguatan infrastruktur digital, termasuk optimalisasi pemanfaatan JIP, dapat berjalan secara berkelanjutan. Ke depan, percepatan proses persetujuan terhadap permohonan peningkatan kapasitas *bandwidth*, serta penguatan mekanisme koordinasi dan kolaborasi antar instansi, menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan dan peningkatan kualitas layanan SPBE secara menyeluruh.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

ARSITEKTUR DATA DAN KERJA SAMA LINTAS SEKTOR

a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

- 1) **Reviu dan *updating* SK** Tim Koordinasi Satu Data BPOM Tahun 2025

- 2) **Rapat Monitoring dan Evaluasi Internal SPLP** pada tanggal 4 Februari 2025, yang membahas kondisi pelaksanaan SPLP di BPOM, termasuk rencana integrasi data CekBPOM dengan Datalake serta kebutuhan evaluasi berkala sistem integrasi. Kedua,
- 3) **Rapat koordinasi lanjutan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)** pada tanggal 24 Februari 2025, yang memperluas diskusi ke arah penyelarasan kebijakan nasional dan alur pertukaran data dengan SDI (Satu Data Indonesia). Dalam kedua rapat tanggal 4 dan 24 Februari tersebut dibahas pula tantangan teknis seperti potensi duplikasi alur data antara SPLP dan SDI, ketidaksesuaian frekuensi pembaruan data, serta kebutuhan tambahan infrastruktur untuk mendukung sinkronisasi data yang lebih optimal. Diskusi juga mencakup pentingnya penyusunan SOP standar alur data serta perlunya pemantauan dan evaluasi berkala sebagai prasyarat peningkatan level kematangan indikator 18 SPBE.
- 4) **Pengembangan Fitur dan Spesifikasi Aplikasi Portal Satu Data BPOM**

Pada TW I 2025, telah dilaksanakan dua forum pengembangan, yaitu Pembahasan Spesifikasi Teknis Portal Satu Data pada tanggal 30 Januari 2025 dan 4 Maret 2025. Agenda ini membahas kebutuhan penguatan server, pengaturan masa aktif API berdasarkan frekuensi pemakaian, fitur anti DDoS, dan log aktivitas pengguna. Tim juga menyepakati bahwa Portal Satu Data akan menjadi gateway utama pertukaran data di lingkungan BPOM. Salah satu usulan penting adalah adanya fitur notifikasi pembaruan dataset kepada pengguna dan peningkatan sistem keamanan melalui load balancer.
- 5) **Permintaan dan Pemanfaatan Data oleh Internal dan Eksternal BPOM**

Sepanjang TW I tahun 2025, sejumlah unit kerja di BPOM dan mitra eksternal telah mengakses data melalui Portal Satu Data. Beberapa data yang diakses antara lain:

- Data PBF – Satu Sehat Kemenkes (diakses sejak 14 Januari 2025)
- Master Data SIASN BPOM oleh Biro SDM (22 Januari 2025)
- Data Jabatan PFM oleh PPSDM (22 Januari 2025)
- Data Efek Samping oleh Pusdatin (4 Februari 2025)
- Integrasi SMARTPOM dengan KRISNA – Bappenas (24 Maret 2025)

Seluruh permintaan difasilitasi melalui endpoint dan dilakukan validasi permintaan sesuai SOP permintaan data publik dan internal. Selain itu, data-data yang telah dibagipakaikan melalui portal Satu Data BPOM antara lain:

- a. Produk Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika → Sumber data: SMARTPOM (BPOM)
- b. Jumlah Produk Obat Sampai Tahun 2030 → New-Aero (BPOM)
- c. Master Data - Jabatan → SIASN (BPOM)
- d. Data Produk KFA Satu Sehat Kemkes → API Product KFA (Kemenkes)
- e. Manajemen Risiko → SAPA API (BPOM)
- f. Data Penyidikan → SIMETRIS (BPOM)
- g. Jumlah Industri Farmasi di Provinsi DKI Jakarta → e-Sertifikasi (BPOM)
- h. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Provinsi DKI Jakarta → Sertifikasi CDOB (BPOM)
- i. Master Data - Satker Wilayah - DJPK → Excel Kode Satker Wilayah DJPK (Kemenkeu)

- j. Data Realisasi DAK Non Fisik - ALADIN → Aladin DJPK (Kemenkeu)
- k. DAK Wilayah → KRISNA (BAPPENAS)
- l. Non-Fisik Pagu → KRISNA (BAPPENAS)
- m. Non-Fisik Rencana Penggunaan Dana (RPD) → KRISNA (BAPPENAS)

6) Penguatan Integrasi Data Registrasi dan Dashboard Pre-Market serta Peningkatan Kualitas Aliran Data dan Strategi Migrasi ke Portal Satu Data

Portal Satu Data juga menjadi pondasi dalam proses integrasi data registrasi lintas aplikasi seperti New-Aero, ASROT, Notifkos, E-Reg RBA, dan E-Reg Lama. Hal ini mendukung pengembangan Dashboard Pre-Market yang akan menampilkan data agregat dan detail status perizinan edar berdasarkan hierarki proses registrasi. Rapat koordinasi pada tanggal 25 Februari dan 25 Maret 2025 membahas penyamaan format *query view*, validasi tabel ke *Singlestore*, dan simulasi migrasi data dari sumber aplikasi ke Portal Satu Data.

Sebagai tindak lanjut, telah disepakati strategi migrasi data Cek BPOM ke Portal Satu Data. Rencana ini mencakup penyediaan *view query* dari masing-masing aplikasi, penggabungan data dalam satu tabel master, hingga pembuatan endpoint API untuk keperluan integrasi dan pengawasan publik. Penarikan data akan diarahkan melalui sistem *queue*, dengan pemantauan performa sistem melalui *stress test* dan penyesuaian jadwal pembaruan data menjadi lebih sering (harian atau per jam). Peningkatan ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan data yang lebih *real-time* sekaligus memperhatikan kapasitas infrastruktur PDN.

b. Layanan Data terbuka

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

1) Reviu dan *updating* SK Tim Koordinasi Satu Data BPOM Tahun 2025

2) Kunjungan ke BPOM Command Center (BCC)

- a. Kunjungan Kantor Kepresidenan ke BCC Tanggal 13 Februari 2025
- b. Pada tanggal 4 Maret 2025, BCC menerima kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Kepala Badan Pangan Nasional dalam rangka pembahasan sinkronisasi dan kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas di sektor pangan.
- c. Kunjungan Mahasiswa Magang Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 7 Maret 2025

Total kunjungan BCC sebanyak 11 kunjungan yang terdiri dari kunjungan Kementerian/Lembaga lain, instansi pendidikan, serta lembaga penyiaran.

3) Koordinasi untuk memastikan validitas data dan informasi yang ditampilkan di dashboard BCC yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025 terkait Pembuatan *Dashboard* Pre-Market Badan POM yang mengundang unit registrasi di BPOM. Pada Koordinasi tersebut membahas tentang struktur dan kebutuhan *dashboard*, standar dan integrasi data, serta kendala dan tantangan pada *dashboard* tersebut.

4) Pembuatan dan Updating Dashboard BCC

Pembuatan dan updating dashboard BCC sampai TW 1 Tahun 2025 telah dibuat sebanyak 68 dashboard dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendukung layanan publik sebanyak 28 dashboard
- b. Dukungan kebijakan sebanyak 23 dashboard
- c. Pengawasan Obat dan Makanan sebanyak 18 dashboard

c. Manajemen data

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada triwulan 1 antara lain :

- 1) Sharing Knowledge Use Case AI pada tanggal 13 Januari 2025
Koordinasi ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang langkah-langkah ataupun metode yang tepat dalam implementasi AI pada penggunaan data di BPOM.
- 2) Pembahasan Manajemen Data pada tanggal 5 Februari 2025
Koordinasi ini dilaksanakan untuk menghasilkan diskusi terhadap pengelolaan data di BPOM terkait implementasi kebijakan dan standar data di BPOM.
- 3) Assessment Data Source Use Case AI pada tanggal 17 Februari 2025
Koordinasi ini bertujuan untuk tahapan assessment terhadap sumber data BPOM yang akan dibuat menjadi usecase AI.
- 4) Persiapan Spesifikasi Proof of Concept YugaByte pada tanggal 17 Maret 2025

INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PUSAT DATA

a. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN)

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional di Triwulan 1:

- 1) Rapat Koordinasi dengan Dynatrace Asia-Pacific Pte Ltd tanggal 12 Februari 2025
Koordinasi untuk menjalin koordinasi strategis antara pihak Dynatrace Asia-Pacific Pte Ltd dalam rangka mendukung transformasi digital dan optimalisasi sistem teknologi dan khususnya dalam hal pemanfaatan solusi observabilitas dan pemantauan sistem TI yang ditawarkan oleh Dynatrace

- 2) Audiensi Pemanfaatan dan Pengelolaan Resource Layanan Komputasi Awan Pemerintah (*Government Cloud*) dengan Inspektorat VI Komdigi tanggal 19 Februari 2025 dilakukan untuk Menyusun rencana tindak lanjut dan kerja sama strategis dalam implementasi dan optimalisasi penggunaan layanan *Government Cloud* di lingkungan Badan POM.
 - 3) Rapat Koordinasi dengan PT TKMT tanggal 3 Maret 2025 membahas implementasi dan penguatan mekanisme *Privileged Access Management* (PAM) dalam lingkungan sistem informasi Badan POM
 - 4) Audiensi PT. Aplikasinusa Lintasarta tanggal 14 Maret 2025 membahas potensi kerja sama dalam pemanfaatan layanan infrastruktur digital, khususnya di bidang jaringan
 - 5) Tiketing PDNS
 - a. Permohonan Penambahan Resource Pool pada VDC Badan POM
 - b. Permohonan Penambahan Storage pada VDC Badan POM
- b. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) di Triwulan 1:
- 1) Sharing knowledge Jaringan Badan POM tanggal 9 Januari 2025
Dalam rangka adanya perputaran SDM Infrastruktur maka dilakukan kegiatan sharing knowledge jaringan badan POM untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan infrastruktur jaringan
 - 2) Permintaan Permohonan Penambahan Bandwidth JIP
 - 3) Pembuatan VPN PIC Aplikasi yang berguna untuk mengamankan dan mengenkripsi koneksi antara server dan pihak terkait, guna menjaga kerahasiaan data, mencegah penyadapan, dan memastikan integritas komunikasi dalam pengelolaan sistem atau layanan digital.

KEAMANAN TIK DAN PERSANDIAN

a. Implementasi Business Continuity Plan (BCP)

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I 2025 antara lain :

- 1) Pembahasan Business Continuity Plan (BCP) dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, Jam 09:00 di Ruang Rapat Pusdatin Gedung Phinisi Lantai 6.

b. Pelaporan Insiden

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I 2025 antara lain :

Laporan terkait insiden yang terjadi serta penanganannya yang dilaporkan sebanyak 6 (enam) insiden dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Backdoor pada Aplikasi TTAC
- 2) Backdoor dan SQL Injection pada Asrot
- 3) Backdoor pada E-Standar Pangan
- 4) Backdoor pada Aplikasi SIAP-UK
- 5) Backdoor pada Aplikasi Penindakan

c. Pelaksanaan SIT (*System Integration Test*) dan Pelaksanaan UAT (*User Acceptance Test*)

Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I 2025 antara lain :

- 1) Pelaksanaan pengujian *System Integration Test* (SIT) dan *User Acceptance Test* (UAT). Pelaksanaan SIT/ UAT bertujuan untuk memastikan sistem terintegrasi dengan baik, aman, dan berjalan sesuai kebutuhan dan fungsi.
- 2) Terdapat 2 (dua) sistem informasi yang telah dilakukan proses SIT untuk dapat dilanjutkan pada UAT. SIT Triwulan 1 Tahun 2025 yaitu SIT Infalabs (modul pelatihan) tanggal 28 Februari 2025, Lulus dan SIT Evaluasi KIE tanggal 18 Maret 2025, Lulus.

- 3) Sistem informasi yang telah dilakukan SIT juga telah dilanjutkan proses UAT. Pelaksanaan UAT Triwulan 1 Tahun 2025 yaitu pada UAT Sistem Sipusakom, tanggal 6 Januari 2025, Lulus dan UAT Sistem Sisobat, tanggal 8 Januari 2025, Lulus.
- d. Rapat Awal Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Nasional, BPOM sebagai Tim Penanganan Kerentanan.
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I 2025 antara lain :
- 1) Pertemuan Awal Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Nasional - Tim Penanganan Kerentanan pada tanggal 5 Februari 2025 di Ruang Rapat Gedung Phinisi Lantai 6 dan juga melalui aplikasi *zoom meeting*.
 - 2) Pertemuan Kedua Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Nasional - Tim Penanganan Kerentanan pada tanggal 19 Maret 2025 di Ruang Rapat Gedung Phinisi Lantai 6 dan juga melalui aplikasi *zoom meeting*.
- e. Pelaksanaan Vulnerability Assessment (VA)
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan I 2025 antara lain :
- 1) *Vulnerability Assessment* (VA) Aplikasi Sang Integritas dan disampaikan pada Rapat penyampaian Hasil *Vulnerability Assessment* Aplikasi Sang Integritas dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 di Ruang Rapat Gedung Phinisi Lantai 6.
 - 2) *Vulnerability Assessment* (VA) Aplikasi KIE dan disampaikan pada Rapat penyampaian Hasil *Vulnerability Assessment* Aplikasi KIE dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 di Ruang Rapat Gedung Panacea Lantai 4.

SASARAN 1

Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi

PERSENTASE DATA DAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG ANDAL DAN TERINTEGRASI

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan I 2025

Realisasi dan target triwulan I tahun 2025 pada Indikator ini belum bisa dibandingkan karena hasil pengukuran capaian kinerjanya baru dapat dilihat pada Triwulan ke II.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2025 dengan Realisasi Triwulan sebelumnya

Pada triwulan I Tahun 2025 belum diperoleh hasil capaian kinerja, sehingga hasil atau nilai tidak dapat dibandingkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Capaian realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target capaian kinerja tahunan karena capaian realisasi baru terlihat pada triwulan ke II.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator ini dapat dicapai melalui:

- a. Komitmen pimpinan organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja yang sudah Ditetapkan;
Komitmen pemimpin memberikan efek positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan realisasi kinerja capaian Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi. Komitmen dalam kepemimpinan menciptakan pondasi kuat bagi budaya kerja yang positif, memotivasi anggota tim, dan membawa perubahan yang berkelanjutan untuk melakukan integrasi tanpa membuat sistem informasi baru. Dukungan pimpinan dalam integrasi akan menentukan peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan penganggaran terkait sistem informasi terintegrasi sehingga dapat terealisasi sesuai target.

- b. Koordinasi antar unit dan lintas sektor secara berkesinambungan agar integrasi dapat terwujud;

Dalam implementasi integrasi sistem informasi dilaksanakan koordinasi dan kerjasama yang berkesinambungan agar semua kebutuhan dapat diidentifikasi dan dipersiapkan secara baik dan matang serta dapat diidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dan menyiapkan segala alternatif. Dengan persiapan yang baik diharapkan integrasi sistem dapat diimplementasi dengan efektif, efisien, cepat sehingga dapat memberikan manfaat maksimal serta output sesuai kebutuhan bagi masyarakat maupun pemerintah.

- c. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap aplikasi;

Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala per triwulan baik dengan pihak eksternal maupun internal agar kebermanfaatan serta perbaikan agar integrasi sistem dapat dilaksanakan mendukung integrated governance serta dengan data yang

teintegrasi maka akan mempermudah pimpinan dalam pengambilan keputusan

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Melakukan pendampingan dalam proses pengembangani sistem informasi. Pendampingan akan dilakukan oleh staf Pusdatin guna mempercepat implementasi sistem informasi serta juga melakukan sharing knowledge kepada unit agar aware dengan persiapan dan pelaksanaan integrasi sistem guna mendukung perwujudan visi misi BPOM.
- b. Melakukan Koordinasi secara intensif dengan Unit/Kementerian/Lembaga. Hal ini dilaksanakan guna percepatan integrasi, melalui koordinasi dengan pihak terkait langsung yang membangun sistem informasi maka elemen data dan kebutuhan integrasi dapat dilaksanakan dengan lancar.

SASARAN 1

Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realitie dan Terintegrasi

INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK (IPS)

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan I 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena hasil pengukuran capaian kerjanya dilakukan di akhir tahun dan dilakukan oleh BPS

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2025 dengan Realisasi Triwulan sebelumnya

Pada triwulan I Tahun 2025 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Pembangunan Statistik yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) baru dapat diperoleh pada Triwulan IV 2025, dikarenakan waktu assessment penilaian masih menunggu konfirmasi dari BPS.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Capaian realisasi Indeks Pembangunan Statistik didapat pada akhir tahun, sehingga pada triwulan I Tahun 2025 belum didapatkan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Dalam mendukung implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorale maka dilakukan persiapan penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Dalam pelaksanaan Pusdatin melibatkan Tim Penilai Internal EPSS BPOM yang

diwakilkan oleh unit kerja yang mendukung penilaian untuk setiap indikator. Adanya Surat Keputusan Tim Penilai Internal EPSS BPOM merupakan salah satu bentuk komitmen unit kerja dalam mendukung BPOM meraih Indeks Pembangunan Statistik yang optimal. Selain itu adanya koordinasi yang baik bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selaku pembina statistik BPOM tahun 2025 menjadi salah satu penyebab keberhasilan indikator ini.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Telah berpartisipasi dalam *Kick Off Meeting* Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 pada tanggal 06 Februari 2025.
- b. Telah dilaksanakan rapat koordinasi awal pada tanggal 18 Februari 2025 bersama Tim Penilai Internal EPSS BPOM yang ada pada SK Tim Penilai Internal EPSS BPOM Tahun 2025. Kegiatan ini membahas terhadap rekomendasi penilaian IPS tahun 2024 serta membahas dua kegiatan yang akan diajukan dalam penilaian IPS tahun 2025.

SASARAN 2

Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Yang Optimal Pusat
Data Dan Informasi Obat Dan Makanan

NILAI PEMBANGUNAN ZI PUSAT DATA
DAN INFORMASI

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan I 2025

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada satuan kerja/Unit Kerja.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Suatu satuan kerja/unit kerja dapat memenuhi WBK/WBBM melalui penilaian maturitas terhadap sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas.

2. Perbandingan realisasi dan capaian triwulan I Tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya belum bisa dibandingkan.

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2024 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I Tahun 2025 dengan target Tahun 2025

Realisasi indeks RB di Pusdatin triwulan I tahun 2025 belum diperoleh karena hasil penilaian oleh APIP baru akan diperoleh di akhir tahun.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pusdatin tahun 2024 telah melaksanakan perbaikan Reformasi Birokrasi yang hasilnya sudah diterima di TW 4 2024 dengan hasil meningkat dari tahun sebelumnya. Penyebab kegagalan di tahun sebelumnya adalah kurangnya pemahaman dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dalam koridor Reformasi Birokrasi. Ditahun 2024 Pusdatin melakukan perbaikan dengan dimulai dari komando Reformasi Birokrasi oleh pimpinan tertinggi di Pusdatin dengan melakukan sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman mekanisme dan kriteria pembentukan Tim pelaksana RB.
- b. Review Tim Pelaksana RB dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan melibatkan seluruh karyawan Pusdatin
- c. Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dalam upaya pemahaman Reformasi Birokrasi bagi seluruh karyawan Pusdatin
- d. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ZI tahun 2024

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Faktor yang menjadi penunjang keberhasilan dalam pembangunan Zona Integritas menuju dalam WBK/WBBM adalah pemahaman yang baik bagi segenap unsur pelaksana kegiatan dan Pusdatin dengan komitmen pimpinan sebagai role model dan komitmen seluruh pelaksana kegiatan. Sosialisasi seluruh unsur Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan menghasilkan pemahaman yang baik dan membangun komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari Pusdatin.

SASARAN 2

Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Yang Optimal Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan

NILAI AKIP PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan I 2025

Pada triwulan I Tahun 2025 belum didapatkan hasil pengukuran Nilai AKIP.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2025 dengan Realisasi Triwulan sebelumnya

Pada triwulan I Tahun 2025 belum diperoleh hasil pengukuran Nilai AKIP yang dilaksanakan oleh APIP/Inspektorat, sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Hasil Nilai AKIP baru dapat diperoleh pada bulan Desember 2025, dikarenakan *assessment* penilaian dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Pada triwulan I Tahun 2025 belum didapatkan hasil pengukuran Nilai AKIP.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada tahun 2024, Pusdatin memperoleh nilai AKIP sebesar 81,87, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut, adapun rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2024 antara lain:

- a. Melaksanakan seluruh tahapan penyesuaian perencanaan kinerja pada periode selanjutnya sesuai pedoman implementasi SAKIP di BPOM dan

Melengkapi seluruh dokumen pendukung terkait perubahan RAPK periode selanjutnya (jika ada).

- b. Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.
- c. Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yg memadai, tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun juga memanfaatkan hasil kajian atas kendala/hambatan serta data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja.
- d. Melengkapi dokumen apabila terdapat perubahan target dengan menyertakan justifikasi hasil analisa komprehensif termasuk dokumen kertas kerja dasar perhitungannya, sebagai bukti bahwa perubahan target telah melalui pemahasan dengan pimpinan unit.
- e. Menyempurnakan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang sudah dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai pedoman implementasi SAKIP di BPOM
- f. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan taget kinerja yang belum tercapai.
- g. Menyusun, mengesahkan dan menyampaikan LEI sesuai ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman SAKIP BPOM.
- h. Mendokumentasikan seluruh bukti implementasi terhadap kebijakan pemberian Reward dan Punishment di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.

- i. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.
- j. Mengoptimalkan pelaksanaan reviu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja.
- k. Melengkapi hasil perhitungan efisiensi Sasaran Strategis maupun IKU dengan analisa yang komprehensif menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Sasaran dan atau IKU dalam Laporan Kinerja Interim dan atau Tahunan, dengan harapan hasil analisis tersebut dapat menggambarkan upaya pengendalian kinerja yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan referensi oleh Satker lain untuk mengupayakan efisiensi penggunaan anggaran/SDM secara lebih optimal.
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras.
- m. Mendokumentasikan data awal atau data sumber dan kertas kerja yang digunakan untuk perhitungan data kinerja sebagai pendukung pelaporan kinerja pada aplikasi SIMETRIS dan pelaporan kinerja lainnya untuk dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja.
- n. Mengoptimalkan peran Tim Pengelola SAKIP di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan melaksanakan pengembangan kompetensi terkait implemementasi SAKIP melalui sosialisasi/bimtek/pelatihan terkait

SAKIP dengan harapan tim SAKIP dapat mendukung implementasi SAKIP Satker secara menyeluruh.

- o. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama, agar dapat mendukung upaya perbaikan kinerja dan implementasi SAKIP pada periode selanjutnya.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, pada triwulan I tahun 2025 telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi AKIP 2024 sebagai berikut:

1. Dikarenakan terdapat penyesuaian target untuk indikator Indeks Nilai SPBE maka terjadi perubahan RAPK dan Pusdatin telah melengkapi dokumen pendukung terkait perubahan RAPK tersebut.
2. Penyesuaian Manual IKU yang dilengkapi dengan Informasi terkait Kode Indikator kinerja, tabel data (baseline dan target), penjelasan terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada masing-masing IKU.
3. Pembahasan awal terkait revisi SOP pengumpulan Kinerja
4. Penyusunan SK *Reward and Punishment* 2025
5. Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP
6. Pimpinan Unit Kerja sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah di dokumentasikan pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025. Kemudian dalam Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025 telah menyajikan data capaian kinerja per bulan mengacu pada breakdown target pada RAPK. Pada triwulan I tahun 2025 juga telah disusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dan laporan Tahunan Tahun 2024.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU, kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti serta realisasi anggaran pada satker Pusdatin, tim SAKIP mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, dan mengikuti rapat kerja nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan selalu ditingkatkannya kompetensi tim SAKIP setiap tahun, diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem AKIP yang lebih baik.

SASARAN 2

Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Yang Optimal Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan

NILAI KINERJA ANGGARAN PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan I 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2025 dengan Realisasi Triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian Triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Pada triwulan I Tahun 2025 belum didapatkan hasil dari Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusdatin.

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan I Tahun 2025 belum dapat didefinisikan, hal ini dikarenakan capaian output selama triwulan I pada indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) belum dapat diinput serta nilai kinerja perencanaan anggaran dirilis di akhir tahun.

Namun dalam mendukung peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran maka dilakukan pengelolaan keuangan yang baik serta disesuaikan dengan seluruh target indikator pada penilaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Indikator tersebut diantaranya:

- a. NK Perencanaan Anggaran
 - Capaian RO
 - Penggunaan SBK

- Efisiensi SBK
- b. NK Pelaksanaan Anggaran
 - Revisi DIPA
 - Deviasi Hal III DIPA
 - Penyerapan Anggaran
 - Belanja Kontraktual
 - Penyelesaian Tagihan
 - Pengelolaan UP dan TUP
 - Capaian Output

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan target-target indikator pada penilaian IKPA, penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun eksternal (KPPN Jakarta VI dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DKI).

SASARAN 2

Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Yang Optimal Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan

INDEKS MANAJEMEN RISIKO PUSAT DATA DAN INFORMASI

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Target Triwulan I 2025

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan sesuai jadwal yang telah dijadwalkan oleh inspektorat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I 2025 dengan Realisasi Triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian Triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan target tahunannya

Pada triwulan I Tahun 2025 belum didapatkan hasil dari Nilai Kinerja Anggaran Satker Pusdatin.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian Nilai Kinerja Manajemen risiko pada triwulan I Tahun 2025 belum dapat didefinisikan dikarenakan pengukuran capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun. Namun untuk mendukung peningkatan maturitas manajemen risiko di Pusdatin telah dilakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian dari inspektorat

- a. Pelaporan manajemen risiko dilakukan tepat waktu sesuai dengan timeline yang diberikan oleh inspektorat yaitu tanggal

- b. Telah dilakukan reviu terhadap daftar risiko Pusdatin tahun 2024 sesuai dengan hasil penilaian dari inspektorat

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mendukung peningkatan maturitas manajemen risiko di lingkungan Pusdatin pada TW I telah dilaksanakan Refreshment Manajemen Risiko kepada tim pengelola manajemen risiko di lingkungan Pusdatin tahun 2025. Selain itu dilakukan juga reviu terhadap daftar risiko Pusdatin tahun 2024 untuk menentukan daftar risiko 2025 yang telah di submit pada aplikasi SAPA API.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nilai Indeks SPBE	<p>1. Hasil Indeks SPBE BPOM pada tahun 2024 adalah 4,53</p> <p>2. Telah dilakukan reviu terhadap Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang menghasilkan rancangan Kepka Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2024.</p> <p>3. Telah disusun rancangan SOP Makro dan Mikro sebagai pedoman implementasi arsitektur dan peta rencana SPBE BPOM</p>	<p>PERENCANAAN DAN PENJAMIN MUTU TIK: <u>Rencana Aksi Triwulan 1:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu SK Tim terkait SPBE Tahun 2025 2. Sosialisasi dan Awareness ISO 3. Reviu Permohonan Alat Pengolah Data sesuai Standar Infrastruktur TIK 4. Reviu Inisiasi Proyek Pengembangan Aplikasi sesuai Peta Rencana SPBE 5. Reviu Rancangan SOP SPBE 	Akhir Tahun	<p>ARSITEKTUR DATA DAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu dan Penetapan SK Tim Satu Data BPOM 2025 2. Reviu dan Penetapan SK Tim BCC 2025 3. Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM TW I 4. Monev Manajemen Data TW I 5. Monev 	<p>PERENCANAAN DAN PENJAMIN MUTU TIK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ditetapkan SK Tim Koordinasi SPBE BPOM Tahun 2025 	<p>PERENCANAAN DAN PENJAMIN MUTU TIK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan II 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditetapkan SK Tim Koordinasi Satu Data dan BCC Tahun 2025. 2. Telah dilaksanakan koordinasi lintas sektor dan monitoring serta evaluasi terkait SPLP, Manajemen Data dan layanan terbuka yang melibatkan internal dan eksternal BPOM 3. Telah ditetapkan SK Tim Asesor dan Tim Reviu SPBE Tahun 2025 4. Telah dilakukan analisa dan reviu terhadap inisiasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ARSITEKTUR DATA DAN KERJASAMA LINTAS SEKTOR : <u>Rencana Aksi</u> <u>Triwulan 1:</u> 1. Reviu dan Penetapan SK Tim Satu Data BPOM 2025 2. Reviu dan Penetapan SK Tim BCC 2025 3. Monev implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) BPOM TW I 4. Monev Manajemen Data TW I 5. Monev Penggunaan Layanan Data terbuka TW I		Penggunaan Layanan Data terbuka TW I PERENCANAAN DAN PENJAMIN MUTU TIK: 1) Reviu SK Tim terkait SPBE Tahun 2025 2) Sosialisasi dan Awareness ISO 3) Reviu Permohonan Alat Pengolah Data sesuai Standar Infrastruktur TIK 4) Reviu Inisiasi Proyek Pengembangan Aplikasi sesuai Peta Rencana SPBE 5) Reviu Rancangan SOP SPBE INFRASTRUKTUR			proyek TWI 1 untuk 12 Aplikasi 5. Telah dilaksanakan reviu dan rekomendasi permohonan APD pada 6 permohonan oleh unit kerja 6. Telah dilaksanakan awareness ISO 27001:2022 dan ISO 37001:2016 7. Telah dilakukan pembahasan bersama Biro Hukur dan reviu terhadap rancangan SOP Makro dan Mikro terkait layanan SPBE di BPOM 8. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS PUSAT DATA: <u>Rencana Aksi Triwulan 1:</u> 1. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) TW 1 2. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) TW 1</p> <p>KEAMANAN TIK DAN PERSANDIAN <u>Rencana Aksi Triwulan 1:</u> 1. Pembahasan Update Teknologi Keamanan Siber (Cybersecurity) 2. Rapat</p>		<p>DAN FASILITAS PUSAT DATA : 1. Monev Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) TW 1 2. Monev Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) TW 1</p>			<p>pemanfaatan PDN di Triwulan 1 9. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan JIP di triwulan 1</p>

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>Pembahasan Laporan Monitoring Fire Eye Tim Badan Intelijen Negara (BIN) selama periode Triwulan Tahun 2025</p> <p>3. Pembahasan Pekerjaan Jasa Konsultan Red Team TA 2025</p> <p>4. Implementasi Business Continuity Plan (BCP)</p> <p>5. Penyampaian Hasil Vulnerability Assessment (VA)</p> <p>6. Rapat Awal Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Nasional, BPOM sebagai Tim Penanganan Kerentanan</p>					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Pelaksanaan System Integration Testing (SIT) 8. Pelaksanaan User Acceptance Testing (UAT) 9. Pengadaan Antivirus Server dan EndPoint					
2	Persentase Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	Belum adanya akses terpusat untuk akun dan akses ke dalam aplikasi yang terintegrasi di Badan POM untuk internal dan eksternal (pelaku usaha)	Rencana Aksi TW1 : - Pengumpulan Informasi dan Spesifikasi Kebutuhan	Akhir Tahun	Pembahasan Teknis Kerja Sama Pengembangan Single Sign On (SSO) dengan PERURI di minggu ke 3	Pembuatan portal sso dan integrasi aplikasi dalam proses bisnis sesuai arsitektur spbe	Akhir Tahun	Telah dilakukan Pembahasan Teknis Kerja Sama Pengembangan Single Sign On (SSO) dengan PERURI di minggu ke 3

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Hasil Indeks Pembangunan Statistik (IPS) BPOM pada tahun 2024 adalah 2,61 Telah dilakukan reviu terhadap rekomendasi penilaian IPS tahun 2024	<u>Rencana Aksi Triwulan 1:</u> 1. Reviu SK Tim Penilai Internal (TPI) EPSS BPOM tahun 2025 2. Melakukan kick off meeting EPSS tahun 2025 3. Pembina kegiatan statistik BPOM pada tahun 2025 dibawah Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Dit. PMSS) 4. Rapat pembahasan awal EPSS bersama unit kerja produsen data	Akhir Tahun	1. Reviu SK Tim Penilai Internal (TPI) EPSS BPOM tahun 2025 2. Melakukan kick off meeting EPSS tahun 2025 3. Rapat pembahasan awal EPSS bersama unit kerja produsen data	Pembina kegiatan statistik BPOM pada tahun 2025 dibawah Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Dit. PMSS)	Akhir Tahun	1. Telah ditetapkan SK TPI 2. Telah dilakukan <i>kick off meeting</i> EPSS tahun 2025 3. Telah ditetapkannya 2 (dua) kegiatan statistik yang akan di evaluasi pada penilaian EPSS tahun 2025 yaitu a) Survei Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, b) Kompilasi Data Kepatuhan Pelaku Usaha
4	Nilai Pembangunan	Nilai Pembangunan ZI pada Tahun 2024	<u>Rencana Aksi Triwulan 1:</u>	Akhir Tahun	Kegiatan yang telah dilakukan pada Bulan		Akhir Tahun	Kegiatan yang telah dilakukan pada

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ZI Pusat Data dan Informasi	adalah: 86,31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan SK Tim RB Pusdatin tahun 2025 2. Penyusunan Pedoman Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) 3. Pembuatan SK AOC dan Medsos 2025 4. Penyusunan SK Rencana Aksi Pembangunan ZI 5. Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan 6. Sosialisasi dan Internalisasi Pembangunan ZI 7. Penyusunan Tim PIPK 8. laporan monitoring dan evaluasi WBS 		Maret 2025 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan tanggal 3 Maret 2025 di lingkungan Pusdatin melalui Zoom Meeting 2. Reviu dan revisi ke2 Standar Penyelenggaraan Dukungan Layanan SPBE Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan No Dokumen. PR.MR-28 tanggal 12 Maret 2025 3. Pelaporan Identifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan Periode Triwulan I Tahun 2025 di Lingkungan BPOM tanggal 20 Maret 			Bulan Maret 2025 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan tanggal 3 Maret 2025 di lingkungan Pusdatin melalui Zoom Meeting 2. Reviu dan revisi ke2 Standar Penyelenggaraan Dukungan Layanan SPBE Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan No Dokumen. PR.MR-28 tanggal 12 Maret 2025 3. Pelaporan Identifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan Periode Triwulan I Tahun 2025 di Lingkungan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2025 Rapat yang telah dilaksanakan bulan Maret 2025 : 1. Sosialisasi Penguatan pengawasan dalam mendukung zona integritas menuju wbk dan wbbm di lingkungan Pusdatin bpom tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025 2. Undangan Koordinasi Pengisian LKE Pembangunan ZI 2025 dalam rangka penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi pusdatin tanggal 21 Maret 2025 3. Undangan Pengisian LKE Pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun			BPOM tanggal 20 Maret 2025 Rapat yang telah dilaksanakan bulan Maret 2025 : 1. Sosialisasi Penguatan pengawasan dalam mendukung zona integritas menuju wbk dan wbbm di lingkungan Pusdatin bpom tahun 2025 tanggal 3 Maret 2025 2. Undangan Koordinasi Pengisian LKE Pembangunan ZI 2025 dalam rangka penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi pusdatin tanggal 21 Maret 2025 3. Undangan Pengisian LKE Pembangunan Zona

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2025 dalam rangka penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi pusdatin tanggal 24 Maret 2025			Integritas (ZI) tahun 2025 dalam rangka penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi pusdatin tanggal 24 Maret 2025
5	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	Nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 81,87. Capaian nilai AKIP Pusdatin tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 84 (97,46%)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu terhadap keselarasan antara perencanaan, peng ukuran kinerja dengan melengkapi kertas kerja, dan memastikan pelaporan dan Evaluasi Kinerja. Melakukan pembahasan rekomendasi dan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan bersama dengan 	Akhir Tahun	<ol style="list-style-type: none"> Dikarenakan terdapat penyesuaian target untuk inddikator indeks Nilai SPBE maka terjadi perubahan RAPK dan Pusdatin telah melengkapi dokumen pendukung terkait perubahan RAPK tersebut. Penyesuaian manual IKU yang dilengkapi dengan informasi terkait Kode 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan seluruh tahapan penyesuaian perencanaan kinerja sesuai dengan pedoman implementasi SAKIP BPOM Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan 	Akhir Tahun	<ol style="list-style-type: none"> Dikarenakan terdapat penyesuaian target untuk inddikator indeks Nilai SPBE maka terjadi perubahan RAPK dan Pusdatin telah melengkapi dokumen pendukung terkait perubahan RAPK tersebut. Penyesuaian manual IKU yang dilengkapi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			inspektorat.		<p>Indikator kinerja, tabel data (baseline dan target), penjelasan terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada masing-masing IKU.</p> <p>3. Pembahasan awal terkait revisi SOP pengumpulan Kinerja</p> <p>4. Penyusunan SK reward and Punishment 2025</p> <p>5. Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP</p> <p>6. Pimpinan Unit Kerja sebagai pengambil keputusan (decision maker)</p>	<p>atau evaluasi internal</p> <p>3. Menyempurnakan pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data dkinerja</p> <p>4. Mengoptimalkan revidu berjenjang terhadap penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen pelaporan kinerja.</p> <p>5. Memastikan seluruh proses tindak lanjut hasil evaluasi AKIP 2024</p>		<p>dengan informasi terkait Kode Indikator kinerja, tabel data (baseline dan target), penjelasan terkait tata cara perhitungan sesuai karakteristik pada masing-masing IKU.</p> <p>3. Pembahasan awal terkait revisi SOP pengumpulan Kinerja</p> <p>4. Penyusunan SK reward and Punishment 2025</p> <p>5. Pengembangan Kompetensi Tim SAKIP</p> <p>6. Pimpinan Unit Kerja sebagai</p>

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah didokumentasikan pada laporan Evaluasi Internal triwulan I 2025 .</p> <p>7. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025 telah menyajikan data capaian kinerja per bulan mengacu pada breakdown target pada RAPK</p> <p>8. Pada Triwulan I tahun 2025 juga telah disusun Laporan Kinerja tahun 2024 dan</p>			<p>pengambil keputusan (decision maker) telah terlibat dan berperan aktif dalam mengukur capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal, hal ini telah didokumentasikan pada laporan Evaluasi Internal triwulan I 2025 .</p> <p>7. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I 2025 telah menyajikan data capaian kinerja per bulan mengacu pada breakdown target pada RAPK</p> <p>8. Pada Triwulan I</p>

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Laporan Tahunan 2024			tahun 2025 juga telah disusun Laporan Kinerja tahun 2024 dan Laporan Tahunan 2024
6	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2024 adalah: 99,37	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA Melakukan revisi 	Akhir Tahun	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan Melakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu 	<ol style="list-style-type: none"> Berkonsultasi dengan pihak KPPN mengenai penginputan capaian output dan melakukan pemantauan berkala pada aplikasi SAKTI Melaksanakan kegiatan dan pencairan dana pada SBKU Layanan BMN untuk memaksimalkan indikator efisiensi capaian Nilai EKA 	Akhir Tahun	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan reviu penyerapan anggaran satker setiap bulan Telah dilakukan pembahasan rencana penarikan dana satker setiap triwulan. Telah dilakukan revisi anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			anggaran sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh Kemenkeu					
7	Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 adalah 2,906 dengan tingkat maturitas Risk Aware	Evaluasi Kinerja	Akhir Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah tersusunnya SK Manajemen Risiko 2025 2. Sharing knowledge dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 3. refreshmen manajemen risiko bersama dengan konsultan Ahli 4. refreshment lanjutan dengan mengidentifikasi kembali risiko di masing-masing fungsi Pusdatin yang dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mereviu kembali daftar risiko yang telah disusun dan melakukan penilaian dan penanganan terhadap risiko tersebut 2. Menginpukan kembali ke SAPA APIP untuk daftar risiko yang telah di reviu 	Akhir Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah di susun dan di sahkan SK manajemen risiko tahun 2025 2. Melakukan Sharing knowledge dan Evaluasi Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko Pusdatin Tahun 2024 bersama Tim Inspektorat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 3. Melaksanakan Melaksanakan refreshmen manajemen risiko bersama dengan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah Selesai**	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					bersama dengan konsultan Ahli			<p>konsultan Ahli yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025</p> <p>4. Melaksanakan refreshment lanjutan dengan mengidentifikasi kembali risiko di masing-masing fungsi Pusdatin yang dilaksanakan bersama dengan konsultan Ahli pada tanggal 11 Maret 2025</p>

3.3 Realisasi Anggaran

- a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran).

Target		Realisasi		Persentase	
Kegiatan	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Kegiatan	Realisasi Anggaran
27	44.521.934.000	27	5.418.124.498	34.39%	12.17%

- b. Realisasi anggaran per Sasaran, yang meliputi:
- Sasaran Strategis untuk level BPOM;
 - Saran Program untuk Satker level Eselon I; dan
 - Sasaran Kegiatan untuk Satker Pusat (Eselon II) dan UPT.
- c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

No	Sasaran Strategis	% Capaian Anggaran	% Capaian Sasaran Strategis	Tingkat Efisiensi	Kategori
1.	Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	24,38%	36%	75%	Efisien
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Optimal Pusat Data Dan	52,61%	18,75%	75%	Efisien

	Informasi Obat Dan Makanan				
--	----------------------------	--	--	--	--

BAB IV PENUTUP

Pada Tahun 2025 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis dan 7 (Tujuh) indikator kinerja kegiatan. Pada Triwulan I 2025 dari Pagu anggaran sebesar 44.521.934.000 telah terealisasi sebesar 5.418.124.498 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 12,17% dan persentase realisasi fisik sebesar 34,39%. Dengan rincian capaian indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) indikator kinerja dengan kriteria BAIK yaitu Nilai Indeks SPBE
2. 6 (Enam) indikator kinerja yang BELUM DAPAT DITENTUKAN kriterianya yaitu:
 - 1) Persentase Data Dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Andal dan Terintegrasi
 - 2) Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
 - 3) Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi
 - 4) Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
 - 5) Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi
 - 6) Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi

Selama pelaksanaan TW I 2025 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan menemui beberapa hambatan serta telah dilakukan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

Hambatan	Tindak Lanjut
1. Revisi target untuk kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1. Akan dilaksanakan revisi target untuk kegiatan pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi setelah dilakukannya Revisi DIPA
2. Tidak terbacanya nilai kinerja organisasi	2. Telah dilaksanakan reuiu dan penyesuaian Target Triwulan untuk

<p>dikarenakan seluruh IKU memiliki target tahunan sehingga diperlukan Penyesuaian target pada salah satu IKU agar nilai kinerja organisasi dapat terbaca</p>	<p>IKU indeks SPBE</p>
---	------------------------

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrochman Indraajaya Sukma
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama

Kepala Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indrajaya Sukma

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengawas
Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE	4.59 Nilai
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi	20 %
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.8 Nilai
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi	86.52 Nilai
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi	81.88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi	97.47 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi	2.94 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 44.521.934.000 (Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4114 - Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	44.521.934.000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data dan
Informasi Obat dan Makanan

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
Makanan RI




Abdurrochman Indrajaya Sukma



TARUNA IKRAR

2. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA




**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE												4.59	25,785,944,000	
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi													20	4,934,400,000
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)													2.8	2,266,266,000
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi												86.52	106,533,000	
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi												81.88	1,194,499,000	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi												97.47	10,082,714,000	
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi												2.94	151,578,000	
Total													44,521,934,000			


JAKARTA, 12 February 2025

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN



ABDURROCHMAN INDRAJAYA SUKMA

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA - REVISI


RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Data dan Sistem Informasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Andal, Realtime dan Terintegrasi	01 - Nilai Indeks SPBE			4.53			4.53			4.53		4.59	25.785.944.000	
		02 - Persentase data dan sistem informasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang andal dan terintegrasi											20	4.934.400.000	
		03 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)											2.8	2.266.266.000	
2.	02 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Optimal Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	01 - Nilai Pembangunan ZI Pusat Data dan Informasi											86.52	106.533.000	
		02 - Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi											81.88	1.194.499.000	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi											97.47	10.082.714.000	
		04 - Indeks Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi											2.94	151.578.000	
Total													44.521.934.000		

Jakarta, 15 April 2025

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indraja, S.Kom, M.Kom